

DAFTAR SINGKATAN

BPK	= Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	= Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BAWASDA	= Badan Pengawas daerah
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
ITJEN	= Inspektorat Jenderal
KEPPRES	= Keputusan Presiden
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KKN	= Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
LPND	= Lembaga Pemerintah Non Departemen
MA	= Mahkamah Agung
MK	= Mahkamah Konstitusi
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
PP	= Peraturan Pemerintah
POLRI	= Kepolisian Republik Indonesia
PERPRES	= Keputusan Presiden
SAV	= State Audit of Vietnam
SAI	= State Audit International
TIPIKOR	= Tindak Pidana Korupsi
TAP MPR	= Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU	= Undang-undang
UUD 1945	= Undang-Undang Dasar 1945

THE TASK RECONSTRUCTION AND BPKP'S AUTHORITY IN THE CASE OF JUSTICE VAUE BASED CORRUPTION

ABSTRACT

by

Sarbudin Panjaitan¹

H.Gunarto²

H. Jawade Hafidz³

According to the 1945 Constitution (UUD 1945), *BPK* (State Audit Body) is a supervision body providing official report pertaining to state finance to House of Representatives (DPR). Besides as a State Audit Body, Non-Departmental State Body (LPND) that supervises the state finance and developments according to Presidential Decree Number 103/2001 Concerning to Position, Task, Function, Authority, Organizational Structure and Job Description of Non-Departmental State Body dated 13 September 2001 at Clause 3 Point 17 and Government Regulation Number 60/2008 Concerning to Governmental Internal Controlling System Clause 1 Point 4 that *BPKP* (*Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*) providing supervision and audition towards state finance and developments in accord with Regulations and responsible to President.

The objectives of this research are to know the task and authority of BPKP in auditing the state finance and development, and the task reconstruction and BPKP's authority in the case of justice value based corruption.

This research uses 1). Grand theory covering justice and legal state theories, 2). Middle theory, covering authority and legal processing theories, 3). Applied theory, covering the theory of progressive law, This research also uses descriptive analytical methods with juridical, empiric, sociological and normative approaches. Sample is done by purposive sample. Data collection techniques are done by library research, interview with respondents, legal documents related to the topic.

The result of this research indicates that in practice, the law-up holders such as Polices, Prosecutors, and KPK (the Corruption Eradication Commission) investigators still use the auditors from BPKP in corruption cases in Indonesia. While according to UUD 1945 Clause 23E and Law No. 15/2006 Concerning to BPK is a legal body to audit, and expert witnesses from independent BPK-RI.

¹. Law Student Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

². Promotor Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

³. Co. Promotor Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

Therefore, based upon justice value, it's the time to do reconstruction towards the Presidential Ordinance Number 192/2014 Concerning to BPKP in performing audit, investigative audit, state loss calculation audit, or as expert witnesses in corruption cases, then for the next there will be no more dualism auditors in Indonesia except only one body of audit, namely BPK.

Keywords: *reconstruction, task, authority, BPKP, corruption*

REKONSTRUKSI TUGAS DAN WEWENANG BPKP DALAM PERKARA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

ABSTRAK

oleh
 Sarbudin Panjaitan¹
 H.Gunarto²
 H.Jawade Hafidz³

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya punya hubungan antar lembaga-lembaga negara berdasarkan atas sistem pengawasan dan penilaian adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tugasnya memberikan laporan dan bahan-bahan tentang penggunaan uang negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan menilai serta meneliti kemanfaatan/penggunaan serta sahnya pengunaan uang anggaran.

Di samping lembaga negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalagi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No.103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen tanggal 13 September 2001 pada Pasal 3 butir No.17 dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 1 butir 4 yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP. Berdasarkan Pasal 52 Keputusan Presiden tersebut bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang BPKP dalam melakukan audit terhadap perkara korupsi di Indonesia saat ini, dan kelemahan pelaksanaan tugas dan wewenang BPKP dalam melakukan audit terhadap perkara korupsi di Indonesia saat ini serta rekonstruksi ideal tugas dan wewenang BPKP dalam melakukan audit terhadap perkara korupsi berbasis nilai keadilan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) *Grand Theory* (teori utama) meliputi teori keadilan dan teori negara hukum, 2) *Middle Theory* (teori tengah), meliputi teori kewenangan dan teori bekerjanya hukum, 3) *Applied Theory* (teori aplikasi) meliputi teori hukum progresif.

¹. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

² . Promotor Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

³ . Co. Promotor Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula

Bahan penelitian yang digunakan adalah 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari norma atau kaedah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan dasar yaitu Batang tubuh UUD 1945 dan Tap MPR, dan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri 2) Badan Hukum Sekunder terdiri dari Rancangan Undang-Undang, 3 Badan Hukum Tertier terdiri dari bibliografi dan kamus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan penelitian hukum sosiologis, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, wawancara dan pengamatan terlibat.

Hasil temuan dalam penelitian ini, bahwa dalam prakteknya penegak hukum yaitu penyidik Kejaksaan, Polri dan KPK masih menggunakan tenaga auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara korupsi di Indonesia saat ini, padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan UU.No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berwenang melakukan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara dan sebagai saksi ahli adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang independen.

Oleh karena itu berbasis pada nilai keadilan, sudah saatnya dilakukan rekonstruksi terhadap Peraturan Presiden RI .Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberi tugas dan kewenangan kepada BPKP untuk melakukan audit, baik audit investigatif dan audit penghitungan kerugian negara, maupun sebagai saksi ahli dalam perkara korupsi, dengan demikian maka ke depan di Negara Indonesia tidak ada lagi dualisme auditor, tetapi hanya 1(satu) lembaga auditor yaitu BPK.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Tugas dan Wewenang, BPKP, korupsi.